

TESIS

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Disusun dan diajukan oleh

HASRIANI

P022201041



PROGRAM STUDI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB
DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

*Implementation Of The Kampung KB Program
In Pangkajene District and Island*

**Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah**

Disusun dan diajukan oleh

HASRIANI

Kepada

SEKOLAH PASCA SARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

LEMBAR PENGESAHAN TESIS
IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB
DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Disusun dan diajukan oleh

HASRIANI

P022201041

Telah di pertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister **Program Studi Perencanaan dan**
Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
pada tanggal 26 Januari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



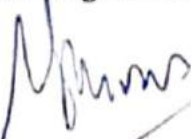
Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si
Nip. 196011231986032001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Hamsinah, M.Si
Nip.195511031987022001

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.eng
Nip. 196207271989031003

Dekan Sekolah Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc
Nip. 196703081990031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hasriani
NIM : P022201041
Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Hasriani

PRAKATA

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia_Nya, serta sholawat atas baginda Rasulullah SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Peminatan Kependudukan, Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, tetapi dengan segala doa dan usaha serta bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ibunda **Syamsiah Ruhing (alm)** dan Ayahanda **H.Amir Mallino** atas segala pengorbanan yang tulus, ikhlas, serta doa yang diberikan kepada ananda yang tidak ada henti-hentinya.

Terima kasih juga kepada **Muhammad Ahsan Samad, S.IP, M.Si**, pendamping hidup dan Imam bagi keluarga kami, sekaligus rekan diskusi akademik penulis selama proses perkuliahan sampai kepada penyelesaian Tesis ini. Kepada **Ghazi Muhammad Al_Fatih** dan **Maryam Shofawatul Marwa**, kedua cahaya hidup kami yang menjadi penyejuk jiwa serta alasan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan pascasarja ini. Kepada

kakak, adik dan keluarga besar kami atas supportnya kepada penulis.

Selain itu dengan segala hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Instansi Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep yang senantiasa memberikan support kepada penulis pada masa proses studi.
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
3. Ibunda Prof.Dr.RabinaYunus,M.Si, selaku pembimbing I sekaligus sebagai koordinator Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Peminatan Kependudukan, bukan hanya sebagai guru bagi penulis, tapi sudah menjadi seorang bunda yang sangat memberikan perhatian ekstra bagi kami anak-anaknya. Semoga bunda Prof senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu mendidik serta menebar kabaikan bagi anak didiknya.
4. Ibunda Prof. Dr. Hamsinah, M.Si. Selaku pembimbing II dan banyak memberikan masukan secara akademik, nasehat kehidupan serta contoh kebijaksanaan seorang guru kepada

penulis. Hanya Allah SWT saja yang mampu membalas semua jasa dan kebaikan ibu kepada kami.

5. Bapak Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU, Bapak Dr. M. Ramli AT, M.Si, Bapak Dr. Madris, DPS., SE. M.Si, selaku dosen penguji atas segala koreksi, saran dan arahan demi kesempurnaan tesis ini.
6. Bapak Ibu Dosen Pada Program Studi studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (PPW) Peminatan Kependudukan Angkatan 2020, atas ilmu yang telah diberikan. Semoga menjadi amal Jariyah di akhirat kelak.
7. Tenaga pendidik serta rekan-rekan mahasiswa, khususnya program studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Peminatan Kependudukan Angkatan 2020, serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan, kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.
8. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dari proses pengumpulan data, pengolahan hingga interpretasi data sehingga tesis ini dapat terbangun dengan baik.

Makassar, 23 Januari 2022

Hasriani

ABSTRAK

Hasriani. Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (dibimbing oleh **Rabina Yunus** dan **Hamsinah**).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Pangkep serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami sejauh mana program kampung KB terimplementasi di lapangan, dengan pendekatan kualitatif akan terjalin komunikasi yang interaktif kepada masyarakat sebagai sasaran program. Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara sejumlah pihak yang terkait dengan program kampung KB di Kabupaten Pangkep, serta data sekunder berasal dari dokumen hasil temuan penulis. Hasil penelitian tentang Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Pangkep terlihat bahwa manfaat dari program kampung KB di Kabupaten Pangkep adalah dengan terlaksananya program pembangunan masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran berbagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya. Perubahan yang diharapkan memperlihatkan bahwa keberadaan kampung KB mendapatkan tanggapan positif baik dari masyarakat ataupun pemerintah setempat. Bentuk support dan dukungan pemerintah dalam hal ini pemerintah kecamatan sangat positif. Selain itu kampung KB juga telah terbukti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam hal peningkatan sumber pendapatan tambahan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga selain mengharapkan penghasilan utama dari suami. Indikator *type* manfaat, indikator perubahan yang diharapkan, dan indikator komunikasi adalah indikator dominan pada hasil penelitian ini. Sedangkan indikator Sumberdaya dan Struktur Birokrasi menjadi indikator yang masih perlu ditingkatkan karena sumber daya manusia sasaran kampung KB di daerah kepulauan ternyata menjadi kendala karena faktor pendidikan masyarakatnya masih rendah. Terkhusus kepada kampung KB yang tidak memiliki sumber daya manusia mumpuni.

Kata Kunci: Implementasi; kampung KB; kesejahteraan;

ABSTRACT

Hasriani, Implementation of the Family Planning Village Program in Pangkajene District and Island. (supervised by **Rabina Yunus** and **Hamsinah**)

This study aims to describe and analyze the implementation of the Family Planning Village Program in Pangkep Regency and to describe and analyze the factors that determine the implementation of the Family Planning Village Program in Pangkep Regency. This study uses a qualitative approach (qualitative approach). This research was conducted with the aim of exploring and understanding the extent to which the village family planning program was implemented in the field, with a qualitative approach interactive communication would be established to the community as the target of the program. The data used are primary data derived from interviews with a number of parties related to the village family planning program in Pangkep district, and secondary data derived from documents found by the authors. The results of the research on the implementation of the Kampung KB Program in Pangkep Regency show that the benefits of the Kampung KB program in Pangkep Regency are the implementation of family-based community development programs, community welfare, and meeting community needs through the implementation of cross-sectoral program integration. Cross-sectoral development and partnerships involve the roles of various parties such as the private sector, providers, and other stakeholders. The Expected Changes show that the existence of the KB village gets a positive response from both the community and the local government. The form of government support and support, in this case the sub-district government, is very positive. In addition, the KB village has also been proven to be able to improve the standard of living of the community in terms of increasing additional sources of income to meet household needs in addition to expecting the main income from their husbands. Benefit type indicators, expected change indicators, and communication indicators are the dominant indicators in the results of this study. Meanwhile, the Resource and Bureaucratic Structure indicator is an indicator that still needs to be improved because the human resources of the target family planning villages in the archipelago have turned out to be an obstacle because the education factor of the community is still low. Especially for KB villages that do not have qualified human resources.

Keywords: Implementation; Kampung KB; well-being;

Daftar Isi

PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar.....	xiv
BAB 1	1
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB 2	12
Tinjauan Pustaka.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Implementasi Kebijakan.....	14
2.2.1 Implementator Kebijakan Publik	17
2.2.2 Tahapan Implementasi Kebijakan Publik	19

2.3	Model Implementasi Kebijakan	20
2.3.1	Model Implementasi Van Meter dan Van Horn	20
2.3.2	Model Implementasi Masmanian dan Sabatier	21
2.3.3	Model Implementasi Kebijakan Edward III	22
2.3.4	Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle.....	28
2.4	Kampung KB	32
2.4.1	Tujuan Kampung KB	33
2.4.2	Sasaran Kampung KB	35
2.4.3	Syarat Pembentukan Kampung KB	36
2.4.4	Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung KB	37
2.5	Kerangka Pemikiran	38
BAB 3	40
Metode Penelitian	40
3.1	Jenis Penelitian	40
3.2	Instrumen Penelitian.....	42
3.3	Fokus Penelitian.....	43
	Indikator Implementasi Kebijakan menurut Merilee S Grindel	43
	Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III	43
3.4	Lokasi Penelitian	43
3.5	Jenis dan Sumber Data	44
3.6	Pengumpulan Data.....	45
3.7	Teknik Analisis Data	45

BAB 4	47
Hasil dan Pembahasan.....	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.2 Hasil Penelitian.....	55
3.7.1 Implementasi Program Kampung KB.....	55
1. Kepentingan yang dipengaruhi.....	55
2. Tipe Manfaat.....	57
3. Perubahan yang diharapkan	60
4. Letak Pengambilan Keputusan	63
3.7.2 Faktor Penentu Implementasi Program Kampung KB.....	65
1. Komunikasi	65
2. Sumber daya	68
3. Disposisi	71
4. Struktur Birokrasi	73
4.3 Pembahasan	76
4.3.1 Implementasi Program Kampung KB.....	76
1. Kepentingan yang Dipengaruhi	76
2. Tipe Manfaat.....	79
3. Perubahan yang diharapkan	82
4. Letak pengambilan keputusan	87
4.3.2 Faktor Penentu Implementasi Program Kampung KB.....	90
1. Komunikasi	90

2.	Sumber daya,	94
3.	Disposisi,	99
4.	Struktur birokrasi,.....	102
BAB 5		105
Kesimpulan dan Saran		105
5.1	Kesimpulan.....	105
1.	Implementasi Program Kampung KB	105
2.	Faktor Penentu Implementasi Program Kampung KB	106
5.2	Saran.....	108
Daftar Pustaka.....		110

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	19
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	21
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Model Mazmanian dan Sabatier	22
Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Edward III.....	26
Gambar 2.5 Model Implementasi Kebijakan Menurut <i>Grindle</i>	31
Gambar 2.6 Bagan Alur Kerangka Pikir	39
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (<i>sumber BPS Pangkep, 2020</i>)	48
Gambar 4.2 <i>Persentase Luas Daerah Menurut Kecamatan (sumber BPS Pangkep, 2020)</i>	49

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) menjadi salah satu model miniatur pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara sinergis dengan kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan mitra kerja terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintah terendah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia (Rahman & Indrawadi, 2019).

Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Program keluarga berencana berperan penting sebagai pengelola, penggerak, pengendali memberdayakan serta memberikan pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pencapaian pengendalian program KB. Kebijakan keluarga berencana bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui usaha penurunan tingkat kelahiran. (Faturachman dkk 2014). Kebijakan tentang pengendalian program keluarga berencana bersamaan dengan usaha

pembangunan lain yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Nurjannah & Susanti, 2018).

Disamping upaya penurunan tingkat kelahiran, juga dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, yaitu melalui usaha peningkatan gizi keluarga, peningkatan keterampilan dan kecerdasan anak, dan peningkatan pengetahuan serta pengembangan sikap, terutama bagi ibu dalam mengasuh anak.

Dengan disahkan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang merupakan revisi dari Undang-undang No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Menurut pasal 21 Kebijakan Keluarga Berencana (KB) dan bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui usaha penurunan tingkat kelahiran. Kebijakan KB ini bersamasama dengan usaha-usaha pembangunan yang lain selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Upaya menurunkan tingkat kelahiran dilakukan dengan mengajak pasangan usia subur (PUS) untuk berkeluarga berencana. Sementara itu penduduk yang belum memasuki usia subur (Pra-PUS) diberikan pemahaman dan pengertian mengenai keluarga berencana (Rianto et al., 2019).

Untuk mengatasi permasalahan KB tersebut perlu pengendalian dari semua pihak, baik pemerintah dari pusat/kota sehingga masyarakat itu sendiri. Salah satu program dari BKKBN dalam mengatasi

permasalahan kependudukan adalah dengan mencanangkan program kampung KB.

Kampung KB merupakan program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sebagai wujud dari agenda prioritas pembangunan Nawacita periode 2015- 2019. Program tersebut merupakan implementasi dari tiga agenda prioritas sekaligus yakni agenda prioritas ke-3 Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, agenda prioritas ke-5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, serta agenda prioritas ke-8 Revolusi Karakter Bangsa melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Pembentukan kampung KB yang digunakan sebagai solusi untuk menekan angka pertumbuhan penduduk dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia (Bachtiyar & Wibawani, 2017).

Program kampung KB merupakan salah satu realisasi dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan indikator pencapaian program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Ketercapaian program ini dapat dinilai dari beberapa aspek yaitu aspek pengendalian kuantitas penduduk dan aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya. Aspek kedua ini dapat dinilai dari beberapa indikator yakni peningkatan pengguna KB baru, peningkatan jumlah ibu hamil dan menyusui yang mendapatkan pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah

remaja yang aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R), penurunan jumlah perempuan yang buta aksara, peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera dan KS-1 dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Indikator-indikator tersebut merupakan breakdown dari 8 fungsi keluarga seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa 8 fungsi keluarga meliputi: (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi sosial budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan (Istiadi, 2017).

Bukan hanya dalam konsep, pada implementasinya pun kebijakan Kampung KB harus melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah dari semua level (Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Dusun), masyarakat sipil beserta organisasi yang ada serta sektor swasta.

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya adalah; (1) Program Keluarga Berencana (KB) tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era orde baru; (2) Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat Kampung atau yang setara melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait

dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas; (3) Penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat; (4) Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (5) Mengangkat dan menggairahkan kembali program Keluarga Berencana (KB) guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi terjadi pada tahun 2020-2030 (Nani et al., 2019).

Manfaat Kampung KB dapat membangun masyarakat berbasis keluarga melalui delapan fungsi keluarga dan mensejahterakan masyarakat melalui integrasi program lintas sektor. Bila tak dicegah dengan program keluarga berencana (KB), penduduk Indonesia naik dua kali lipat dalam rentang 1990-2020. Tahun 1990 sebanyak 178,6 juta jiwa; tahun 2000 205 juta jiwa, bila tanpa KB 285 juta jiwa, 80 juta kelahiran tercegah; tahun 2010 240 juta jiwa, bila tanpa KB 340 juta jiwa, 100 juta kelahiran tercegah. "Serangan bukan hanya perang, tapi juga ledakan penduduk tak terkendali".

Pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elsa Lettiyani/ Universitas Indo Global Mandiri, Palembang/2020. Dengan Judul Penelitian Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT).

Memperlihatkan hasil penelitian bahwa; Disposisi dalam pelaksanaan sikap implementor dan kelompok sasaran sudah cukup baik dalam merespon program kampung KB, hanya saja pengetahuan dan pemahaman implementor yang berada di Desa Sribunga belum begitu optimal, yang membuat kegiatan pelaksanaan program belum berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan SOPnya berpedoman pada buku petunjuk teknis kampung KB dan fragmentasi telah terstruktur (Lettiyani et al., 2020).

Sedangkan penelitian oleh Arizqi Istiadi/ Universitas Negeri Surabaya/2017 dengan judul penelitian Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Studi Pada Kelompok Sasaran Keluarga Dengan Remaja di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap indikator di dalam teori tersebut yaitu (1) komunikasi yang berisikan transmisi yang dilakukan dengan sosialisasi berupa undangan sosialisasi di balai desa dan di berikan pembekalan, kejelasan informasi masih belum dipahami betul oleh masyarakat, dan konsistensi program Kampung KB di lakukan dengan berdasarkan Juknis Kampung KB (2) sumber daya yang berisikan sumber daya manusia dengan jumlah yang sudah mencukupi, anggaran yang didapatkan berasal dari BKKBN Provinsi, APBD, serta ADD, sementara fasilitas yang diberikan yaitu berupa tempat kegiatan dan juga tambahan buku binaan untuk para kader (Istiadi, 2017)

Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana strategis BKKBN tahun 2015-2019 sejalan dengan renstra. Berbagai isu strategis yang berkembang di Sulawesi Selatan saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan program/kegiatan.

Isu strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; bonus demografi; Pembangunan Sulawesi Selatan dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah dengan proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan program kampung KB.

Kampung KB ini mencoba memadukan konsep pembangunan terpadu bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kampung KB merupakan salah satu upaya menjadikan program KKBPK sebagai program yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kampung KB berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas.

Pada prinsipnya proram BKKBN dan kampung KB akan berkolerasi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPKM) yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indikator untuk mengukur taraf pembangunan manusia dalam sebuah negara ini diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Ada 3 aspek yang dijadikan indikator untuk mengukur capaian dimensi utama pembangunan manusia, ketiga indikator itu adalah; (1) Umur panjang dan hidup sehat, (2) Pengetahuan, (3) standart hidup layak.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun.

Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Sejak tahun 2010 IPM Indonesia terus tumbuh secara konsisten. Pada tahun 2020 pertumbuhan IPM di tingkat nasional daerah menghadapi tantangan dengan tumbuh melambat akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan sebagian besar negara di dunia. Perlambatan pertumbuhan IPM umumnya disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan umur harapan hidup dan pendidikan, serta menurunnya

pengeluaran riil per kapita sebagai akibat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi. (<https://www.bps.go.id/>)

Kampung KB adalah miniatur pelaksanaan program KB secara terpadu dan komprehensif ditingkat lini lapangan (desa/kelurahan/dusun/RW). Konsep kampung KB merupakan konsep terpadu program KB dengan program pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Kampung KB didesain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan program KB. Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Tujuan akhirnya tentu pembangunan masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya menstimulasi dan melakukan pendampingan, selebihnya menjadi tanggungjawab masyarakat. Yakni melalui upaya menjadikan kampung KB sebagai program yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Partisipasi berbagai instansi dalam kampung KB sangat penting sehingga pelayanan paripurna dapat dirasakan langsung oleh masyarakat menuju kesejahteraan rakyat. Kampung KB berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas.

Jumlah kampung KB di Kabupaten Pangkep sampai tahun 2020 adalah sebanyak 24 lokasi, tersebar mulai dari wilayah pegunungan, dataran dan kepulauan. Dengan sebaran lokasi kampung KB di beberapa lingkungan topografi yang berbeda, sehingga secara kajian

sosiologis, karakter masyarakat pesisir, daratan dan pegunungan cenderung berbeda.

Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah seperti apa pola regulasi pemerintah daerah dalam memutuskan atau mengimplentasikan sebuah kebijakan pada pengelolaan kampung KB di berbagai wilayah dengan topografi berbeda tersebut. Selain itu, pada kenyataannya terdapat perbedaan data kegiatan pada setiap kampung KB, Sebagian kampung KB memiliki data kegiatan yang lengkap, namun pada kampung KB lainnya, data kegiatan belum sesuai standar (kurang).

Dengan argumentasi dan temuan data diatas maka peneliti merasa perlu untuk melaksanakan sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka disusunlah rumusan masalah pada penelitian ini yaitu;

1. Bagaimanakah Implementasi Program Kampung KB dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimanakah kualitas hidup masyarakat di kabupaten Pangkep belum sesuai dengan tujuan Program Kampung KB?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Kampung KB dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan kualitas hidup masyarakat di kabupaten Pangkep belum sesuai dengan tujuan Program Kampung KB.

1.4 Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis sebagai bahan kajian akademis bagi diri penulis dalam sarana pengembangan ilmu pengetahuan pada kajian Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah khususnya dibidang kajian implementasi kebijakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberi masukan dan memberikan kontribusi yang objektif bagi para pemangku kepentingan dalam membuat regulasi kebijakan terkait program kampung KB.

BAB 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kampung KB telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, berikut beberapa penelitian terkait kampung KB:

Riski Hoeriah/ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang/2019 dengan judul penelitian Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini Implementasi program Kampung KB di Kampung Kaliwadas belum berjalan secara optimal karena pengurus kampung KB yang kurang aktif dan inisiatif dalam membuat kegiatan untuk poktan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, juga kurangnya koordinasi dan dukungan dari lintas sektor. Saran kepada dinas terkait untuk melakukan peningkatan potensi pengelola dan pelaksana kegiatan di Kampung KB juga peningkatan sarana dan prasarana di Kampung KB.

Elsa Lettiyani/ Universitas Indo Global Mandiri. Palembang/2020, judul penelitian ; Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT). Menggunakan metode

analisis data bersifat deskriptif. Hasil penelitian, Disposisi dalam pelaksanaan sikap implementor dan kelompok sasaran sudah cukup baik dalam merespon program kampung KB, hanya saja pengetahuan dan pemahaman implementor yang berada di Desa Sribunga belum begitu optimal, yang membuat kegiatan pelaksanaan program belum berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan SOPnya berpedoman pada buku petunjuk teknis kampung KB dan fragmentasi telah terstruktur.

Novy Setia Yunas/ Universitas Brawijaya Malang/2019, judul penelitian Collaborative Governance Melalui Program Kampung KB di Kabupaten Jombang, dengan metode penelitian Pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode eksplorasi. Hasil penelitian Secara umum keberadaan Kampung KB berkontribusi secara signifikan pada penguatan program KKBPK. Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, CSO, Sektor swasta dan masyarakat menghasilkan kekuatan besar yang membuat program ini dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, walaupun tidak bisa dipungkiri masih terdapat beberapa kendala dalam anggaran dan fungsi koordinatif. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan dalam tulisan ini berupa penguatan anggaran serta dibentuknya forum yang bisa menjadi wadah koordinasi bagi semua pihak terkait untuk selalu berkoordinasi dan melakukan evaluasi.

Arizqi Istiadi/ Universitas Negeri Surabaya/2017, judul penelitian Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Studi Pada Kelompok Sasaran Keluarga Dengan Remaja di Dusun Waung Desa

Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap indikator di dalam teori tersebut yaitu (1) komunikasi yang berisikan transmisi yang dilakukan dengan sosialisasi berupa undangan sosialisasi di balai desa dan di berikan pembekalan, kejelasan informasi masih belum dipahami betul oleh masyarakat, (2) sumber daya yang berisikan sumber daya manusia dengan jumlah yang sudah mencukupi, anggaran yang didapatkan berasal dari BKKBN Provinsi, APBD, serta ADD, sementara fasilitas yang diberikan yaitu berupa tempat kegiatan dan juga tambahan buku binaan untuk para kader.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang (Hill & Hupe, 2002). Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin, implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Pressman dan Wildavsky memahami implementasi kebijakan sebagai kegiatan menjalankan kebijakan (*to carry out*), memenuhi janji-janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), dan untuk

menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Warwick menyebutkan implementasi kebijakan sebagai transaksi sumber daya. Untuk menjalankan program, implementator harus berhubungan dengan tugas-tugas, lingkungan, klien, dan kelompok terkait. Hill and Hupe (2002) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah formulator dan implementator dapat berintegrasi sebagai aktor kebijakan atau tidak. Pertanyaan berikutnya adalah apakah formulator memiliki legitimasi membuat keputusan atau memiliki peran yang lebih besar daripada implementator atau tidak. Jika tidak, Hill dan Hupe (2002) meragukan apakah implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini beralasan sekali, karena implementasi mengikuti kebijakan apa yang dirumuskan berdasarkan paradigma yang telah diyakini oleh perumus kebijakan (Hill and Hupe 2002).

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah (Purwanto, 2012). Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program

berjalan. Berkaitan dengan badan-badan pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi, serta rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Keempat, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target (Wibawa, 1994).

Grindle menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Ini artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, berarti ada kesalahan dalam analisis kebijakannya (Suntoro & Hariri, 2018)

Van Meter dan van Horn memahami implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakupi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-

keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Permatasari, 2020).

2.2.1 Implementator Kebijakan Publik

Birokrasi merupakan salah satu badan administrasi yang menjalankan proses implementasi segera setelah suatu kebijakan publik telah ditetapkan oleh badan legislatif dan eksekutif. Birokrasi dan badan-badan administrasi lainnya melakukan tugas pemerintah sehari-hari. Pengaruh mereka begitu besar terhadap kehidupan warga negara dibandingkan unit-unit pemerintah lainnya. Hal ini dikarenakan badan-badan administrasi memiliki keleluasaan yang besar dalam menjalankan kebijakan publik yang berada dalam yurisdiksinya (Widodo, 2021).

Lembaga legislatif juga memiliki peran besar sebagai implementator suatu kebijakan, meskipun mereka juga sebagai pembuat kebijakan. Banyak literatur administrasi publik yang menyatakan bahwa politik dan administrasi merupakan kegiatan yang terpisah. Politik berkaitan erat dengan perumusan kebijakan, yang harus ditangani oleh eksekutif dan legislatif. Sementara itu, tata kelola kebijakan, yakni yang berkenaan dengan implementasi keputusan ditangani oleh berbagai badan administrasi. Namun, era sekarang pembagian tugas tersebut tidak terlalu rigid, di mana cabang-cabang administrasi pun seringkali juga terlibat dalam kegiatan perumusan kebijakan. Sebaliknya, badan legislatif juga tidak jarang turut mengimplementasikan suatu kebijakan.

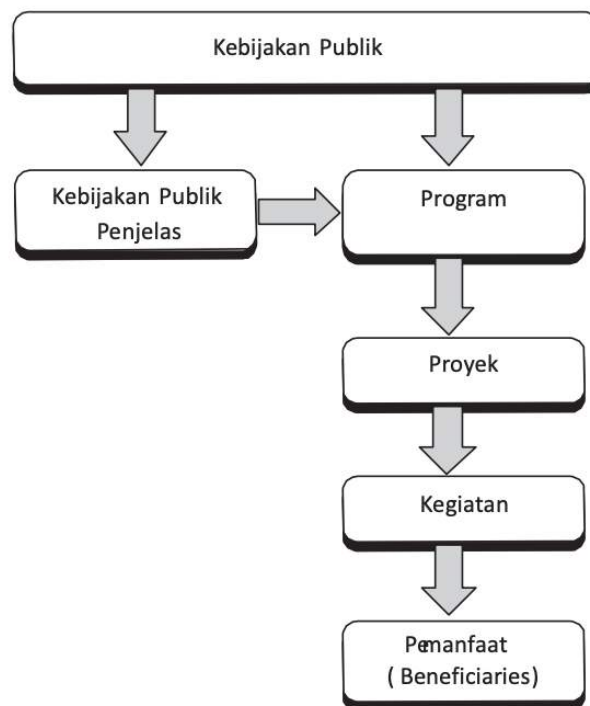
Misalnya, membuat undang-undang yang sangat spesifik ketika berkaitan dengan persoalan implementasi (Negara, 2008) .

Dalam banyak kasus, lembaga peradilan juga terlibat sebagai implementator suatu kebijakan. Misalnya berkaitan dengan undang-undang yang mengatur masalah kriminal, terorisme, aborsi, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Lembaga peradilan juga terlibat dalam tata kelola kebijakan. Tindakan yang berkaitan dengan naturalisasi bagi warga negara asing sejatinya merupakan kewenangan badan administrasi, tetapi dalam realitasnya lembaga peradilan juga turut menanganinya, seperti yang dilakukan oleh peradilan distrik federal di Amerika Serikat. Dengan alasan tertentu, lembaga peradilan dapat membatalkan atau menunda pelaksanaan suatu kebijakan tertentu. Misalnya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang menginstruksikan para hakim pengadilan negeri untuk tidak memberlakukan sebagian pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Mahmudi, 2003).

Kelompok kepentingan dan kelompok penekan, karena kepekaan, kepedulian, dan kepiawaiannya mampu mendesak badan administrasi yang akan mengimplementasikan suatu kebijakan. Kelompok yang berhasil memengaruhi tindakan badan administrasi mempunyai pengaruh secara substansial terhadap arah dan dampak suatu kebijakan. Misalnya, Green Peace dapat mendesak suatu badan pemerintah (administrasi) untuk tidak mengizinkan kapal tanker asing yang akan membuang sampah radioaktif ke laut.

2.2.2 Tahapan Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ada dua pilihan langkah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Pertama, adalah langsung mengimplementasikan dalam bentuk program. Kedua, melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Gambar berikut dapat menjelaskan langkah atau sekuensi implementasi kebijakan public (Purwanto, 2012).



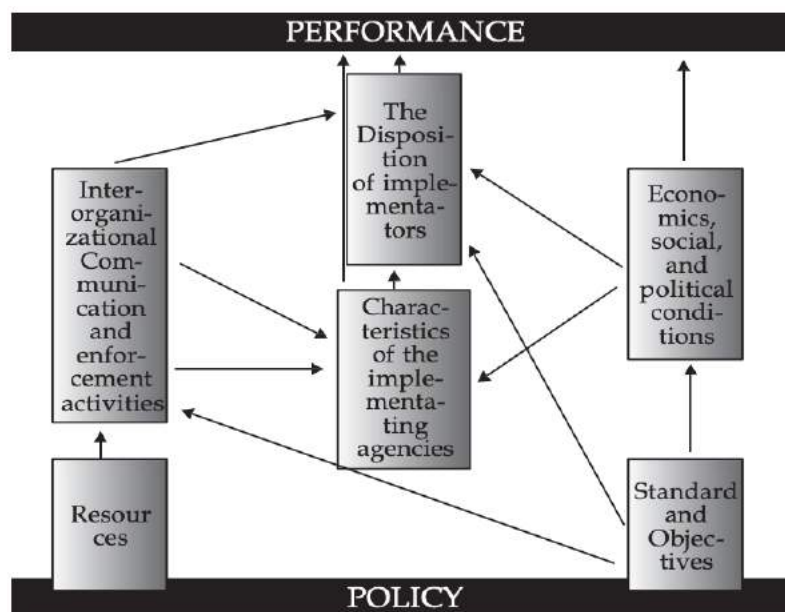
Gambar 2.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan

2.3 Model Implementasi Kebijakan

Ada banyak model implementasi kebijakan publik. Masing masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa model yang disajikan pada proposal ini di antaranya adalah model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, model Mazmanian dan Sabatier, model Edward III, dan model implementasi kebijakan menurut Grindle (Akib, 2012).

2.3.1 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang memengaruhi kebijakan publik yaitu: aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana (implementator), kondisi ekonomi, sosial dan politik serta kecenderungan pelaksana (Kurniawan et al., 2018). Model Van Meter dan Van Horn dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

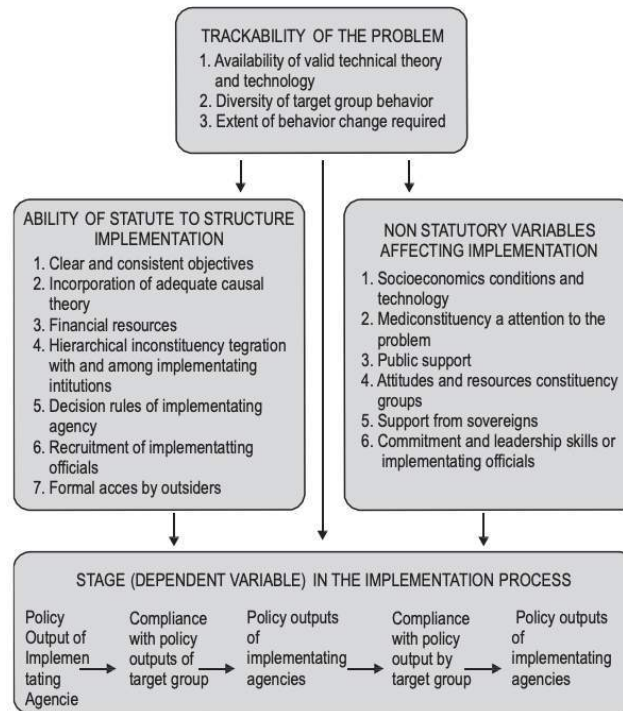
2.3.2 Model Implementasi Masmanian dan Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier disebut dengan model Kerangka Analisis Implementasi. Proses implementasi meliputi tiga variable (Lester & Bowman, 2016). Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang dikehendaki.

Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, serta variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknokogi, dukungan publik, sikap konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yakni pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut atau pun keseluruhan kebijakan yang bersifat

mendasar. Model Mazmanian dan Sabatier dapat dicermati pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Model Mazmanian dan Sabatier

2.3.3 Model Implementasi Kebijakan Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, menunjuk pada 4 (empat) variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. 4 (empat) variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Putra & Khaidir, 2019).

1. Komunikasi, yaitu menunjuk pada setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran

(target groups). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program, maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

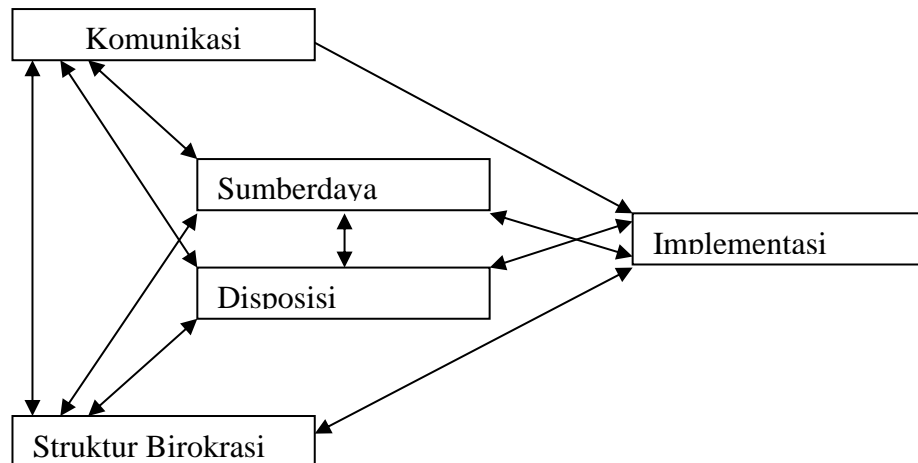
2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementator yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
3. Disposisi, yaitu menunjuk pada karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/program.

Karakter yang penting oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen dan kejujuran yang tinggi akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program atau kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam Guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

4. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan dalam Standar Operating Procedure (SOP) yang dicantumkan dalam Guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya

implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dalam hal ini hanya dapat lahir jika stuktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya saja, implementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya. Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran. Model dari George C.Edward III ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Edward III

Model implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program diberbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan public (Rafi`i et al., 2020).

Model implementasi ini menawarkan konsep implementasi yang menekankan pada elemen penting dari implementasi itu sendiri yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur biroktasi. Semua elemen ini ketika diimplementasikan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri melainkan harus secara utuh dijalankan (holistik).

Tentunya dalam situasi di Indonesia model implementasi ini harus mengalami penyesuaian dan perubahan-perubahan. Hal penting yang harus disesuaikan adalah konteks budaya birokrasi

Indonesia. Birokrasi di Indonesia selalu mengalami distorsi baik dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah. Hal ini tercermin dalam setiap perilaku aparat birokrasi ketika menerapkan suatu aturan atau ketika kebijakan ingin diimplementasikan. Oleh karena itu ketika model implementasi Edward III ini ingin diimplementasikan secara utuh, akan mengalami berbagai hambatan. Hambatan utamanya adalah upaya untuk menjalankan secara semua elemen dari model ini.

Model birokrasi tidak lepas faktor *patron and clean*, dan ditambah virus *weberian* yang membayangi. Nuansa ini sangat terasa dalam lingkungan birokrasi Indonesia terutama tercermin dalam perilaku pelayan aparat birokrasinya. Hubungan antara atasan dan bawahan ditambah dengan budaya *minta petunjuk* terhadap atasan menyebabkan perubahan-perubahan akan sulit dilaksanakan oleh aparat birokrasi pelaksana. Disamping karena faktor budaya yang sangat menjunjung tinggi kepada penghargaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, faktor peninggalan nilai-nilai birokrasi zaman Belanda sangat kental terasa dalam birokrasi di Indonesia (Surur, 2019).

Namun demikian dalam model implementasi Edward III ini bisa dijadikan rujukan dalam implementasi kebijakan di Indonesia. Karena model ini menawarkan suatu konsep dimana implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan jika suatu kebijakan ingin berhasil.

Model implementasi ini sangat cocok untuk menjelaskan faktor-faktor yang berkenaan dengan hambatan dalam implementasi kebijakan. Persoalan pokok yang paling sering terjadi dalam implementasi kebijakan di Indonesia adalah masalah koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Oleh sebab itu model implementasi kebijakan Model Edward III ini memberikan suatu gambaran akan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

2.3.4 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle.

Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Hal ini tergantung pada implementability dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya.

Grindle (dalam Sunggono 1994) bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program telah dirancang dan sejumlah biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sarana-sarana tersebut. Hal inilah yang merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun.

Selanjutnya Grindle mengatkan bahwa tugas implementasi adalah membentuk kaitan yang memungkinkan sasaran kebijaksanaan publik dapat terealisasikan sebagai hasil dari

aktifitas pemerintah, implementasi mencakup penciptaan suatu policy delivery system dimana sarana yang spesifik dirancang dan dilaksanakan dengan harapan dapat sampai pada tujuan akhir yang dinyatakan dalam kebijaksanaan. Kemudian Grindle mempertegas kembali mengenai dua aspek tentang implementasi kebijakan yaitu :

Isi kebijakan meliputi :

1) Kepentingan yang dipengaruhi (*interest effected*)

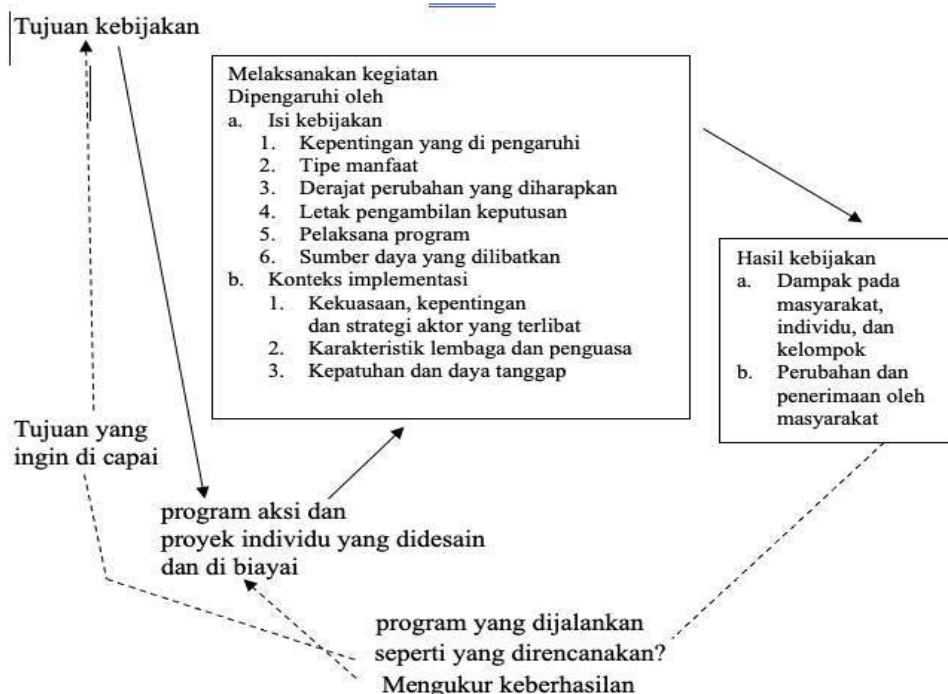
Implementasi program akan ditentukan oleh seberapa jauh perubahan yang diinginkan oleh program atau mengancam kepentingan tertentu dalam masyarakat, kelompok masyarakat yang terancam oleh adanya perubahan cenderung menampilkan sikap pesan baik terbuka maupun terselubung. Agar ini tidak terjadi maka para pelaksana harus menghilangkan atau paling tidak meminimalisasikan ancaman atau melakukan pendekatan pada pihak-pihak yang dirugikan agar sikap mereka lebih *cooperation*. Apabila suatu program menjanjikan keuntungan yang jelas bagi publik, maka pendukung mudah diraih begitupun sebaliknya, untuk itu para pelaksana perlu membuat rencana yang paling jelas bagi kelompok sasaran dan meyakinkan terhadap keuntungan itu agar mereka itu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

- 2) Tipe Manfaat, program yang membawa manfaat secara kolektif akan mendapatkan dukungan terhadap implementasinya.
- 3) Perubahan yang diharapkan (*extent of change visioned*)
Semakin luas perubahan yang diharapkan demi kepentingan publik semakin baik dukungan yang mereka berikan, tapi apabila suatu kebijakan menuntut perubahan berdasar dari kelompok sasaran yang memang tidak terhindarkan, maka pelaksanaan program terlalu menerapkan secara lebih seksama bisa dinetralisir dengan baik.
- 4) Jarak pengambilan keputusan (*site of decision making*)
Keputusan kebijakan melibatkan kelompok kecil, pengambilan keputusan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar tidak terjadi miskordinasi.
- 5) Pelaksana program (*program implementator*)
Perlu ditentukan secara jelas siapa atau instansi mana yang secara fungsional akan dibebani sebagai pelaksana tugas, kemudian apabila implementasi kebijakan bisa berjalan efektif, maka aparat pelaksana perlu memiliki kemampuan plus dan dukungan oleh sumber daya memadai.
- 6) Sumber daya yang digunakan (*resources committed*)

Sumber daya yang digunakan adalah sumber daya dari program/proyek yang dialokasikan maupun sumber daya lokal.

Kebijakan publik dirumuskan dan dilaksanakan dalam suasana atau lingkungan dan memperlancar pelaksanaan kebijakan menurut Grindle ditentukan 3 (tiga) faktor penting, yaitu:

- 1) Kekuasaan kepentingan dan strategi dari mereka yang terlibat (*power interest and strategies of actor invoivex*),
- 2) Karakteristik rezim atau lembaga (*institution and regios characteristic*),
- 3) Kepatuhan Serta Daya Tanggap (*compliance and responsiveness*)



Gambar 2.5 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

2.4 Kampung KB

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, Dusun atau yang setara dengan kriteria tertentu diimana terdapat keterpaduan program pembangunan antara program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Kampung KB merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan program KKBPK kepada masyarakat dengan mengaktualisasikan 8 fungsi keluarga dan membangun karakter bangsa melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Kampung KB menjadi salah satu model miniatur pelaksanaan program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN secara sinergis dengan kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan mitra kerja terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintah terendah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga

dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas.

2.4.1 Tujuan Kampung KB

Tujuan kampung KB jangka panjang adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program KKBPk yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya.

- 1) Tujuan Kampung KB jangka pendek:
 - a) Meningkatkan pengetahuan pengelola kampung KB percontohan di dalam mengelola kampung KB.
 - b) Meningkatkan pencapaian program KKBPk di kampung KB percontohan.
 - c) Meningkatkan komitmen dan koordinasi mitra kerja di berbagai tingkatan terhadap keterpaduan program KKBPk dan pembangunan sektor terkait di kampung KB percontohan.

Meningkatkan kualitas pengelolaan kampung KB melalui peningkatan sinergitas pelaksanaan pembangunan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPk) serta pembangunan sektor terkait bersama mitra kerja agar mampu menjadi kampung KB percontohan.

- 2) Tujuan Umum:

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

3) Tujuan Khusus

Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui:

- a) Peningkatan kualitas dan akurasi data dan peta keluarga
- b) Peningkatan jumlah peserta KB aktif (CU/PUS)
- c) Peningkatan jumlah peserta KB MJKP
- d) Peningkatan jumlah peserta KB Pria
- e) Penurunan angka unmet need
- f) Peningkatan partisipasi keluarga yang memiliki balita dalam Bina Keluarga Balita (BKB)
- g) Peningkatan partisipasi keluarga yang memiliki remaja dalam BKR
- h) Peningkatan partisipasi keluarga yang memiliki lansia dalam BKL
- i) Peningkatan partisipasi lansia dalam BKL
- j) Peningkatan partisipasi remaja dalam PIK
- k) Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan
- l) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- m) Peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat
- n) Peningkatan status sosial ekonomi
- o) Peningkatan rata-rata lama sekolah anak usia sekolah

- p) Peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat
- q) Peningkatan kualitas pembangunan sektor pembangunan terkait

2.4.2 Sasaran Kampung KB

Sasaran kampung KB utamanya adalah penduduk yang tinggal di wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, tetrapencil, pesisir, kumuh, dan kesertaan ber—KB nya masih rendah. Penggarapan program pembangunan berbagai sektor terkait di kampung KB ini diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan fasilitasi dari Kepala Desa, Ketua RW, ketua RT, PKB/PKLB, PKK, institusi masyarakat pedesaan (IMP), tokoh masyarakat, kader, serta lintas sektor terkait. Sasaran kampung KB terbagi menjadi sasaran langsung dan sasaran tidak langsung sebagai berikut:

1. Sasaran Langsung
 - a) Keluarga
 - b) Pasangan Usia Subur;
 - c) Masyarakat;
 - d) Balita, Remaja, Lansia.
2. Sasaran Tidak Langsung
 - a) Tokoh-tokoh masyarakat;
 - b) Organisasi masyarakat (PPKBD, Sub-PPKBD, DKM, Organisasi pemuda, dan sebagainya);
 - c) Petugas lapangan dan provider.

2.4.3 Syarat Pembentukan Kampung KB

Menurut BKKBN, proses pembentukan suatu wilayah akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB perlu memperhatikan prasyarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu

1. Tersedianya data kependudukan yang akurat.

Data ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan data Catatan Sipil yang akan digunakan sebagai dasar penetapan 16 prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan disuatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.

2. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah.

Dukungan dan komitmen yang dimaksud adalah dukungan, komitmen dan peran aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Partisipasi aktif masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat.

2.4.4 Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung KB

Dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yakni kriteria utama, kriteria wilayah dan kriteria khusus, yaitu:

1. Kriteria Utama

- a) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada.
- b) Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

2. Kriteria Wilayah

Dalam pembentukan Kampung KB mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu), yaitu: 1. Kumuh; 2. Pesisir atau Nelayan; 3. Daerah Aliran Sungai (DAS); 4. Bantaran Kereta Api; 5. Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan); 6. Terpencil; 7. Perbatasan; 8. Kawasan Industri; 9. Kawasan Wisata; 10. Padat Penduduk.

3. Kriteria Khusus

1. Kriteria data, dimana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Kependudukan dan atau pencacatan sipil yang akurat.
2. Kriteria kependudukan, dimana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.
3. Kriteria program Keluarga

Berencana, dimana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa atau kelurahan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Model Implementasi kebijakan pada penelitian ini menggunakan model kebijakan menurut Grindell dengan 4 (empat indikator) yaitu; Kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, sumberdaya yang dilibatkan dan pelaksana program. Namun pada hasil penelitian di lapangan, indikator sumberdaya yang dilibatkan dan pelaksana program telah terjawab pada indikator lainnya. Selain itu faktor penentu dalam proses Implementasi kebijakan menggunakan teori dari Edward III untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program kampung KB di Kabupaten Pangkep. Secara detail dapat dilihat pada bagan alur kerangka pikir.

Gambar 2.6 Bagan Alur Kerangka Pikir

